



JM Zacharias
Business Strategist

Pemerintahan Baru dan Tantangan Kemandirian DNA Telekomunikasi Kita

Berakhir sudah rangkaian kegiatan pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU. Pemerintahan baru nanti dihadapkan tugas, tantangan baru dan warisan permasalahan yang ada. Kedaulatan bangsa menjadi isu kampanye, termasuk sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal ini rakyat. Salah satu diantaranya, sektor telekomunikasi yang dipetakan pada sisi kedaulatan telekomunikasi khususnya entitas ekosistem meliputi perangkat, jaringan dan aplikasi dikenal

beberapa tahun terakhir. Meski pada awalnya, umumnya dengan bisnis model mendesain fitur ponsel dan dilanjutkan kegiatan produksi di Tiongkok sebagaimana yang dilakukan Apple (ODM, Original Design Manufacture). Pada perkembangannya bisnis ponsel merek lokal terus bertumbuh, berlanjut dengan relokasi kegiatan produksi ke dalam negeri. Di sisi lain tidak sedikit ponsel lokal tumbang akibat *value proposition* (perbandingan harga dengan fungsi fitur/layanan) yang tidak kompetitif bila dibandingkan dengan ponsel merek global yang punya elastisitas harga dalam mencapai harga kompetitif lantaran didukung volume produksi (supply) terhadap permintaan pasar global (demand) yang besar serta faktor pendukung jaringan purna jual tersebar luas, merata dan solid. Hal ini menjadi pelajaran ke depan untuk fokus produk unggulan didukung konsorsium bisa terdiri dari beberapa perusahaan swasta dan juga melibatkan BUMN berikut keahlian *supply chain*-nya. Strategi ini diterapkan saat industri Jepang bersinergi mengembangkan kamera digital pertama di dunia.

Dengan efisiensi yang meningkat, produktifitas dan pertumbuhan produk telekomunikasi akan berada pada grafik tren positif, harga ponsel pun dapat mengalami penyesuaian seekonomis mungkin sehingga rakyat mempunyai daya beli, kesempatan memiliki serta meningkatkan produktifitasnya dengan menggunakan produk telekomunikasi dalam negeri. Pada tahun 2005 asosiasi GSM dunia menggalakkan program *Connect the Unconnected* ponsel murah bertujuan menjangkau daerah yang belum terkoneksi infrastruktur telekomunikasi.

Selain mendorong industri

ponsel lokal berkembang, membuka pintu masuk industri ponsel global yang tertarik menanamkan investasi di dalam negeri, juga perlu dipandang sebagai usaha mendukung keterbukaan iklim berusaha. Langkah ini diambil tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa seperti transfer teknologi, peningkatan ketrampilan tenaga kerja, tumbuhnya industri komponen nasional dan pengembangan konten lokal yang bekerja sama dengan pemain global, aspek ekonomi serta kelestarian lingkungan hidup.

Bersamaan dengan itu, kepastian kebijakan pemerintah yang jelas dan konsisten, harus dijalankan bersinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah terkait (pemda propinsi dan kabupaten/kota) meliputi insentif pajak, ekspor impor, perijinan, ketersediaan pasokan energi seperti suplai listrik, kebijakan tenaga kerja, kepastian hukum serta pemuatan konten/komponen lokal. Keselarasan kebijakan sebelumnya dan akan datang (wacana) adalah mutlak untuk menihilkan permasalahan kebijakan-kebijakan yang terjadi akibat saling tumpang tindih bahkan kontra produktif.

Masih segar dalam ingatan batalnya rencana investasi pabrik ponsel asal Korea Selatan yang mengalihkan investasi pembangunan pabrik ponsel ke Vietnam lantaran insentif (tax-holiday dan skema pajak) yang tidak kompetitif dibandingkan dengan tax-holiday yang diberikan negara Paman Ho tersebut selama 30 tahun berikut skema pajak dan besarnya menjadi kajian ke depan bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif kita dalam persaingan iklim investasi global. Wacana kebijakan pajak impor komponen dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) harus

Selamat Bekerja Pemerintahan Baru. Wujudkan Jati Diri Kedaulatan Bangsa: Kemandirian DNA Telekomunikasi Kita.

ISLAR
Kendali Drone Lewat Jaringan BTS, Wujudkan!

Vodio Cara Bicara Nonton Video di iPad

Konsumsi Data Purn Meroket

Earin Headphone Terbaik di Dunia

Connected Cars
Ketika Konvergensi Teknologi Selular dan Otomotif Menyala

Watch Over Me Solusi Berkulit Pesawat Darurat Secara Otomatis

TEST
• Akusone Galaxi AP 9300
• Akusone Samsung P18700C
• Akusone Alcatel One Touch 8030
• Akusone HTC Desire S10
• Akusone Nokia N9500
• Akusone HTC Desire S10
• Akusone HTC Desire S10
• Akusone HTC Desire S10
• Akusone HTC Desire S10

dengan DNA (Device, Network dan Application) yang dikelola tenaga handal Indonesia sekaligus memberdayakan manusia Indonesia seutuhnya, dengan sistem yang akuntabel sehingga mendukung upaya dalam mengatasi permasalahan faktual dan juga meningkatkan capaian program pemerintah sebelumnya.

DEVICE (PERANGKAT)

Kondisi ekonomi di tanah air yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% menjadi daya tarik bagi pebisnis asing sekaligus beri ruang banyaknya ponsel merek lokal di market

dibahas dengan matang sekaligus hati-hati karena ini juga menjadi instrumen pertimbangan para pelaku usaha sebelum memutuskan rencana investasi di Indonesia, termasuk mereka yang akhirnya membatalakan dan merelokasi usaha ke negeri lain yang memberikan insentif dan kepastian berusaha. Peluang ini telah lama ditangkap oleh Singapura yang notabene dengan sumber daya demografi dan market terbatas namun menawarkan kebijakan berusaha memikat perusahaan multi nasional untuk menjadikannya sebagai penghubung di kawasan Asia Tenggara, selanjutnya menyasar market yang lebih besar di negara tetangga seperti Indonesia. Bahkan beberapa tahun terakhir meningkatnya arus investasi pemilik modal dari Silicon Valley yang melirik Singapura sebagai second base karena faktor prospek emerging market kawasan ini serta faktor krisis yang terjadi melanda Amerika Serikat dan Eropa sejak 2008.

Proteksi hukum menjadi instrumen bagi konsumen dan pelaku usaha seperti distributor, pengecer, penyedia konten bekerja sama dengan pemegang merek resmi, untuk bebas dari ancaman produk/komponen ilegal, ponsel rekondisi, pungutan liar serta pelanggaran hak cipta. Adanya wacana pemblokiran IMEI pada ponsel ilegal (dalam hal ini ponsel pintar yang tidak membayar PPnBM) perlu dikaji secara matang terkait dengan implementasi dan kesiapan lintas sektoral beserta dampaknya terutama bagi konsumen.

NETWORK (INFRASTRUKTUR JARINGAN)

Efektifitas infrastruktur jaringan dimulai penataan frekuensi, cakupannya serta jumlah optimal pelaku usaha ditunjang evaluasi utilitas, kesesuaian alokasi peruntukannya, kontrol dan penertiban. Implementasi teknologi perlu diperhatikan keberlanjutannya seperti rencana migrasi fixed-wireless CDMA ke E-GSM perlu dikaji dampaknya terutama pada pelanggan.

Operator melakukan efisiensi berdampak restrukturisasi aset melahirkan peluang model bisnis alih daya/penyewaan. Namun proses akuisisi dan integrasi berdampak berkurangnya jumlah operator



berserta infrastrukturnya, menghantam bisnis alih daya.

Infrastruktur dalam kapasitas sebagai pendukung layanan informasi dan komunikasi pada wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, keberadaan satelit sebagai transmisi penghubung beragam alat komunikasi. Peran transmisi strategis ini harus didukung manajemen jaringan terpadu. Dengan keberadaan beberapa satelit saat ini perlu juga dipikirkan optimalisasi kebutuhan kapasitas satelit yang terus berkembang serta perencanaannya ke depan. Bank BRI pun sedang mempersiapkan satelit BRISat mengorbit pada tahun 2016 untuk mendukung operasionalnya hingga pelosok negeri.

Penetrasi broadband sampai ke pelosok negeri mendukung kesetaraan akses internet juga kegiatan ekonomi. Dibutuhkan juga pengelolaan jaringan terpadu dari sumber daya yang dimiliki pemerintah dan swasta meliputi infrastruktur data center, jaringan serat optik baik di darat juga di bawah laut. Proyek Palapa Ring tahap pertama perlu mendapat apresiasi dengan suksesnya menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTB, NTT hingga Sulawesi. Disparitas jaringan broadband di kawasan Indonesia bagian Timur masih menjadi pekerjaan rumah untuk ditindaklanjuti pada proyek Palapa Ring tahap berikutnya.

Akses komunikasi untuk pedalaman tidak hanya dikarenakan kurangnya infrastruktur pendukung namun juga kelayakan aspek bisnis yang menjadi hambatan tersedianya infrastruktur

komunikasi. Solusi platform terbuka OpenBTS berbiaya rendah bisa menjadi opsi pemerintah atasi permasalahan akses komunikasi di pedalaman. Berikut peran bank dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara mobile merujuk sukses program mobile banking M-PESA di pedalaman Kenya.

Persoalan layanan internet global berbandwidth besar yang membebani infrastruktur operator (Over The Top service, OTT) perlu diatur skema kerjasama berikut profit sharing serta relokasi server trafik dalam negeri yang tidak perlu dikirim ke server pusat luar negeri. Penggunaan bandwidth yang

tidak efektif mempengaruhi cost-effective pada akhirnya membebani biaya yang ditanggung konsumen.

APPLICATION (APLIKASI)

Booming-nya bisnis aplikasi menarik investor dunia serta beri iklim kondusif bisnis bertumbuh, ditunjang atmosfer keterbukaan informasi dimana negara harus menjaminkannya. Pemblokiran video sharing Vimeo yang menuai banyak protes Mei lalu karena berdampak tertutupnya akses ke portofolio pelaku ekonomi kreatif yang biasa memanfaatkan layanan yang disediakan Vimeo. Tidak hanya itu saja, kejadian tersebut menjadi preseden buruk jika tidak dibarengi transparansi tata kelola internet secara profesional dan bertanggung jawab.

Kejadian Black October 2011 akibat ulah nakal oknum penyedia konten sehingga semua layanan konten di-unregister, menjadi beban semua penyedia konten dalam meraih kembali customer base-nya. Ironis, memburu tikus, satu lumbung dibakar.

SDM kita diperhitungkan di market global, perlu dukungan insentif, mentorship, pemodalan agar tunas muda jadi wirausaha baru, terus berkembang menjadi pengusaha tangguh yang ikut menggerakkan sendi perekonomian bangsa. Kerjasama pemerintah, swasta dan institusi penelitian/pendidikan bersinergi memperkuat kemandirian DNA telekomunikasi kita yang akhirnya bermuara pada kedaulatan bangsa.

Selamat Bekerja Pemerintahan Baru.